



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2021

BENGKULU UTARA

MINGGU, 10 OKTOBER 2021

SUMBER BERITA

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Inspektorat Audit Dana Satgas Desa

ARGA MAKMUR - Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) menyerahkan pelaksanaan anggaran Dana Desa (DD) Kali tahun ini ke Inspektorat Daerah. Ini terkait temuan dalam pemeriksaan dimana muncul pengakuan jika Rp 80 juta dana Satgas Penanganan Covid-19 tingkat desa tahun ini, diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Inspektur Inspektorat BU, Eka Hendriyadi, SH, MH memastikan memasukan Desa Kali dalam audit akhir tahun. Terutama berkaitan anggaran penanganan Covid-19. Dia berharap jika ada dana yang terpakai untuk kepentingan pribadi, segera dikembalikan.

"Kita akan audit nantinya, karena harusnya dana yang sudah terserap tersebut ada bukti pertanggungjawaban. Harapan kita jika memang tidak digunakan selayaknya, dana tersebut harus bisa dikembalikan," kata Eka.

Ia menegaskan, jika ada temuan kembali diawal tahun depan, maka Inspektorat akan tetap meminta pihak yang bertanggung jawab mengembalikan. Bahkan permasalahan ini bisa bergulir ke ranah hukum jika tidak ada pengembalian.

"Karena jika tidak ada pengembalian dalam 60 hari pascakeluar hasil audit, kita serahkan hasil audit ke aparat hukum. Apalagi jika memang nantinya masalah ini muncul di persidangan," jelas Eka.

Sebelumnya, Kajari BU Elwin Agustian Khar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menyebutkan dalam penyidikan tersangka Sadi (kades nonaktif), terungkap dana satgas tahun ini digunakan. Namun jaksa tidak memasukan itu dalam berkas perkara lantaran memang masih dalam tahun berjalan.

"Makanya kita serahkan ke Inspektorat sampai akhir tahun nanti. Bila nanti berdasarkan hasil audit di tahun depan masih ditemukan kerugian negara, maka akan menjadi kasus baru," pungkas Denny. (qia)